

**Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam
Memutus Perkara Dengan Berdasar *Circumstantial Evidence* Atau
Bukti Tidak Langsung.**

**(Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica
Kumala Wongso).**



DRAFT SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar

Oleh:

MIFTAHUL CHAER AMIRUDDIN

NIM : 10400116135

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Chaer Amiruddin
Nim : 10400116135
Tempat/Tgl.Lahir : Pare-Pare, 3 April 1998
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Btn. Mutmainnah Blok D.1 Kab. Mamuju
Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar *Circumstantial Evidence* Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 19 Oktober 2020

Penyusun,

MIFTAHUL CHAER AMIRUDDIN

10400116135

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar *Circumstantial Evidence* Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)” yang disusun oleh Miftahul Chaer Amiruddin, Nim 10400116135, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 19 Oktober 2020 M
2 Rabi’ul-Awal 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag. (.....)	
Sekretaris	: Dr. Marilang, S.H., M. Hum. (.....)	
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Kasjim, M.Th.I (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Hamsir, S.H., M.Hum (.....)	
Pembimbing I	: Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H (.....)	
Pembimbing II	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H (.....)	

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar


Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.

NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal aalamiin.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak ter tepi, doa yang tak pernah putus dari kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda H. Amiruddin B dan Ibunda Hj. Nurhuda Rahman, yang senantiasa memberikan penulis motivasi, nasihat, serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Keempat saudara-saudaraku Muhlis Amiruddin, Zulfahmi Amiruddin, Nurul Muhlisa Amiruddin, Achmad Suyudi Amiruddin yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga, Serta keluarga penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah “Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar *Circumstantial Evidence* Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya sangat hormati :

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis MA Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, M.H Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan orang tua penulis di jurusan Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan penuh candaan.
4. Bapak Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H, sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus pembimbing II yang perhatian dan senantiasa sabra.
5. Bapak Prof. Dr. H. Kasjim, M.Th.I sebagai Dosen Fakultas Syariah sekaligus Penguji I terima kasih banyak atas perhatian dan masukan-masukannya
6. Bapak Dr. Hamsir S.H.,M.Hum sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Penguji II terima kasih banyak .
7. Seluruh dosen, pejabat dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada umumnya dan dosen jurusan Ilmu Hukum pada khususnya yang senantiasa mengajar penulis.
8. Kakanda Mikel Kelvin, S.H yang selalu memberikan masukan-masukan dan saran-saran terhadap penulis.
9. Seluruh teman-teman Alauddin Law Study Center (ALSC) yang telah banyak memberikan pengalaman-pengalaman dan ilmunya dibidang hukum.
10. Seluruh teman-teman Ilmu hukum Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.
11. Seluruh teman-teman Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar (KPAJ) yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungannya

selama ini.

12. Sahabat- sahabatku Arung, Permana, Fikri Haikal, Muh. Wahid Seiawan, Muh. Gaza, Fikri Agung Wicaksono, Nurannisa Amalia Malik, Putri Nadila, Johar, Nurhikmah Syam, yang telah memberikan bantuan, dukungan tiada hentinya sampai saat ini selama di kota perantauan.
13. Senior-senior yang membantu dalam proses perjuangan, memberikan bantuan, dukungan yang tiada hentinya dan untuk semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, serta teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum UINAM, serta teman-teman PPL Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan KKN Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap angkatan 62.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan juga kepada penulis sendiri, serta umumnya bagi kita semua.

Makassar, 19 Oktober 2020



MIFTAHUL CHAER AMIRUDDIN

NIM : 10400116135

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	VII
ABSTRAK.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul Dan Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Pidana Materiil & Formil.....	16
B. Pembuktian Dalam Ranah Peradilan Pidana.....	20
C. Alat Bukti.....	25
1. Keterangan Saksi.....	27
2. Keterangan Ahli.....	30

3. Surat.....	31
4. Petunjuk.....	35
5. Keterangan Terdakwa.....	36
BAB III BUKTI TIDAK LANGSUNG ATAU <i>CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE</i> DAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA.....	38
A. Bukti Tidak Langsung Atau <i>Circumstantial Evidence</i>	38
B. Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Kedudukan <i>Circumstantial Evidence</i> Atau Bukti Tidak Langsung Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Pidana.....	46
B. Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar <i>Circumstantial Evidence</i> Atau Bukti Tidak Langsung. (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso).....	54
1. <i>Ratio Decidendi</i> Dalam Putusan Membuntikan Unsur Delik.....	55
a) Unsur “Barang Siapa”.....	56
b) Unsur “Dengan Sengaja”.....	57
c) Unsur “Direncanakan Lebih Dahulu”.....	63
d) Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”.....	72
2. Analisa Kasus.....	78
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81

B. Implikasi Penelitian.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	88



ABSTRAK

Nama : Miftahul Chaer Amiruddin
Nim : 10400116135
Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung. (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso).

Skripsi ini berjudul analisis yuridis pertimbangan tentang keyakinan hakim dalam memutus perkara dengan berdasar *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. (studi putusan no.777/pid.b/2016/pn.jkt.pst kasus jessica kumala wongso). Yang bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dan untuk mengetahui pertimbangan keyakinan Hakim dalam menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. (2) Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu berupa saksi *Testimonium de auditu*, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan dan berupa alat bukti surat berupa surat visum, dan screnshoot chat.

Implikasi penelitian yaitu diharapkan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam proses pembuktian pidana karena di khawatirkan dapat mengganggu validitas dari alat bukti yang lainnya, jadi seharusnya diatur lebih rigid.

Kata Kunci: Pembuktian, Keyakinan Hakim, Circumstantial Evidence, KUHAP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.¹

Karakter dari hukum adalah aspek kepribadian yang dimiliki hukum dan berlaku pada suatu kalangan masyarakat (bangsa), yang sesuai dengan letak geografis, sebagai jiwa bangsa (*volkegeist*), sebagai budaya bangsa (*nation's culture*) yang mempengaruhi pandangan, sikap dan perilaku pembentuk hukum dan juga penegak hukum.²

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran, dengan sistem hukum utamanya yaitu hukum Eropa Kontinental atau lebih dikenal *Civil Law*, dimana bahwa semua aturan hukum harus dikodifikasikan kedalam suatu undang-undang baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Mengenai sistem hukum *Civil Law* yang diterapkan di Indonesia maka akan mengerucut pada sistem hukum pidana dan hukum perdata.

Terkait hukum pidana, sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana bersifat hukum publik. Kedudukan kepentingan yang hendak dilindungi oleh

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2014) hlm. 43

² Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)* (Jakarta: Gramedia, 2017) hlm. 86

hukum pidana adalah kepentingan umum. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil yang mengatur tentang penentuan, pelaku, dan sanksi tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedang hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan tata cara beracara didalam pengadilan dan sebagai pedoman atau dasar untuk para penegak hukum melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana materil yang dimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pada tahap pemeriksaan beracara di pengadilan berdasarkan KUHP, jika suatu perkara pidana telah dilakukannya penuntutan, selanjutnya perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Perkara pidana tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim. Sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan³. Alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu

³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm.

1. Keterangan saksi,

Berdasarkan pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dalam proses pemeriksaan dipersidangan jika diadili dengan satu saksi maka itu tidak bisa dikatakan sebagai saksi menurut asas *unus testis nulus testis*.

2. Keterangan ahli,

Berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat

Didalam KUHAP sendiri tidak didefinisikan secara jelas tentang terkait definisi alat bukti surat. Tetapi hanya memberikan penjelasan bahwa surat termasuk alat bukti yang sah. Didalam pasal 187 KUHAP dijelaskan bahwa “surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

4. Petunjuk,

Berdasarkan pada pasal 188 ayat 1 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pada pasal 188 ayat 2 KUHAP dijelaskan bahwa “petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.”

5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan pada pasal 189 ayat 1 KUHAP, keterangan terdakwa adalah ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Maka diluar dari ketentuan yang telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Dengan demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun tentang kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. *Circumstantial evidence* didefinisikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat saksi mata.⁴

Berdasarkan keyakinan Hakim dalam memutus atau menjatuhkan suatu pidana harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain; atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asalkan keterangan saksi dengan

⁴ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hlm. 52

keterangan terdakwa saling berkesesuaian.⁵ Hakim secara mutlak harus memutuskan perkara atau alasan pembuktian pengakuan.

Tidak pernah bisa menyimpulkan sepenuhnya, dengan apa yang diputuskan oleh Hakim sudah sepenuhnya memenuhi tujuan kepastian dan juga pasti keadilan. Hukum juga tidak bisa diidentikkan dengan keadilan, karena hukum itu sebagai sarana sedangkan keadilan sebagai tujuan.⁶

Didalam proses pemeriksaan pembuktian kasus Jessica Kumala Wongso, tidak ada seorangpun saksi yang melihat Jessica menaruh racun sianida didalam kopi yang Jessica pesan untuk korban Mirna, dan rekaman CCTV pun tidak merekam bahwa yang menaruh racun sianida kedalam kopi tersebut adalah Jessica. Jika berdasarkan pasal 1 butir 26 KUHP, untuk bisa dikatakan sebagai saksi haruslah ia melihat, mendengar dan merasakan sendiri.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa bagaimana pertimbangan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya bukti langsung *direct evidence* dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah tetapi mendasarkan pada bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Berdasarkan beberapa uraian diatas yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Berdasar *Circumstantial Evidence* Atau Bukti Tidak Langsung.(Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso).**

⁵ Syaiful Bahkri., *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 41

⁶ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 13

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimana kedudukan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana.
2. Bagaimana pertimbangan keyakinan Hakim dalam memutus perkara dengan berdasar *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung.

(Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)

C. Pengertian Judul Dan Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah dalam fokus penelitian yaitu bagaimana kedudukan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana dan bagaimana pertimbangan keyakinan hakim dalam memutus perkara dengan berdasar *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung.

Untuk memberikan arah yang sesuai dengan permasalahan pokok yang akan dibahas, maka penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang yang dianggap penting, diantaranya :

a. Analisis

Menurut KBBI analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁷

b. Yuridis

Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang mengenai bahwa peraturan yang dibentuk atau dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁸

c. Keyakinan Hakim

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu persyaratan awal yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah.⁹

d. *Circumstantial evidence*

Menurut William R. Bell, *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung merupakan bukti yang secara tidak langsung menunjuk

⁷ <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>, diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019

⁹ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2423> diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019

suatu fakta, akan tetapi bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya.¹⁰

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian yang akan mengkaji permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan banyak literatur dan referensi yang kuat untuk membahas penelitian ini. Refensi yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. Eddy O.S.Hiariej dalam bukunya *Teori & Hukum Pembuktian*. Buku ini menjelaskan lengkap tentang beberapa istilah dan arti penting pembuktian, karakter dan parameter pembuktian, beberapa asas terkait pembuktian, alat-alat bukti, pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia.
2. Syaiful Bakhri, dalam bukunya *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Pada buku ini lebih membahas tentang pembuktian dalam peradilan di Indonesia, terutama terkait dalam peradilan pidana. Buku ini mengambil sudut pandang yang lain dalam menguraikan problematika dalam pembuktian. Dengan mendasarkan pada hakikat keadilan, pembuktian diposisikan sebagai suatu proses yang hendak mencapai keadilan. Sehingga pembuktian tidak hanya dikemukakan dengan perspektif yuridis saja, tetapi dari perspektif filosofis dan historis.

¹⁰ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hlm. 54

3. Alfitra, dalam bukunya *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Buku ini memaparkan penerapan hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia. Mulai dari menentukan metode penemuan fakta, prapenuntutan dan penuntutan, sistem pembuktian, macam alat bukti, kekuatan pembuktian, jenis-jenis barang bukti, hingga penerapan pembuktian terbalik.
4. Margono. dalam bukunya *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Dalam buku ini menjelaskan tentang teori dan konsep dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, profesi hakim dalam penegakkan hukum, asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim.
5. Syarif Mappiasse. dalam bukunya *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Buku ini menjelaskan terkait tentang teori-teori yang mewujudkan putusan legalistic dan argumentative, pertimbangan hukum prismatic dan putusan yang argumentative, putusan hakim sebagai produk hukum dan keadilan.
6. Ahmad Kamil, dalam bukunya *Filsafat Kebebasan Hakim*. Buku ini memberikan penjelasan tentang bagaimana memahami dan mengaplikasikan kebebasan hakim dalam menjalankan tugas negara di bidang kekuasaan kehakiman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹¹

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari *ka re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.¹²

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹³ Penelitian ini mengacu pada data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat.

¹¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Pemelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.148

¹² Said Sampara, Laode Husen, Fauziah Basyuni, Syamsuddin, Fachri Said, *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: Kretakupa Print, 2017), hlm. 23

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.107

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan konseptual, peneliti merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.¹⁴ Pendekatan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada topik pertama.

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materil.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada topik kedua.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan topik permasalahan penelitian. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2017) hlm. 178

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2017) hlm. 158

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 68

- a. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
 - b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun pendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data tersier dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian berupa wawancara dengan pejabat yang berwenang atau mumpuni di bidangnya seperti hakim, pakar hukum, dan dosen-dosen yang hasil substansinya menjadi bahan hukum sekunder.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁷ Metode pengumpulan data ini mengacu pada sumber data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.107

5. Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹⁸

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan keyakinan Hakim dalam menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini antara lain :

- a. Kegunaan Teoritis/Akademis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kedudukan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 69-70

b. Kegunaan Praktik

Untuk dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi semua pembaca, dan sebagai bahan informasi kepada penulis yang tertarik membahas hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana Materil & Formil

Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma hukum pidana.¹⁹ Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.²⁰

Kedekatan hukum pidana dengan masyarakat yang dideskripsikan menunjukkan sifat publik dari cabang hukum ini. Ia melewati kepentingan-kepentingan individu dan mencoba memberi arahan, membentuk perilaku, mengamankan nilai-nilai yang berkembang serta menerbitkan tatanan sosial melalui pranata yang dimiliki. Di dalam hukum pidana mengandung norma larangan dan perintah yang apabila norma-norma tersebut dilanggar, pelakunya akan menerima konsekuensi berupa hukuman yang sedemikian

¹⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syri'ah Komponen MKK* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 23

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm. 1

berat jika dibandingkan dengan sanksi jenis hukum lainnya seperti perdata dan hukum administrasi.²¹

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum public, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan ataupun kelompok orang (suatu organisasi).²²

Hukum Pidana sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hukum yang berlaku *ius constitutum* atau hukum yang dibentuk dan diberlakukan di dalam suatu masyarakat²³, dalam kenyataannya dapat dilakukan pembagian-pembagian yang bisa memperjelas pengetahuan kita tentang hukum pidana.²⁴

Klasifikasi ilmu hukum pidana tergantung pada bagaimana hukum pidana itu dilihat. Ketika hukum pidana dilihat dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak, maka dibedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.²⁵

Hukum pidana materiil berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat

²¹ Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Zulfa, Zakky Ikshan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan* (Depok: Raja Grafindo, 2017) hlm. 2

²² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 11

²³ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitutum-dan-ius-constituendum/>, diakses pada hari Senin, tanggal 18 November 2019.

²⁴ Nandang Sambas & Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP* (Bandung: Refika, 2019), hlm. 5

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015) hlm. 52

dijatuhkan. Dengan demikian hukum pidana materil berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut.

Norma (*norm*) oleh Austin Chinhengo diberikan pengertian sebagai *standard of social behaviour*. Norma adalah standar atau ukuran perilaku sosial. Norma diartikan pula sebagai *they guide conduct*. Norma adalah pedoman untuk berperilaku.²⁶

Hukum pidana formil atau juga disebut hukum acara pidana adalah seluruh garis hukum, yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum dan keadilan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil. Dengan demikian hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya negara dengan peraturan badan-badannya (polisi,jaksa,hakim) dapat menjalankan kewajibannya untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana.²⁷

Jadi hukum pidana materiil itu termasuk dalam KUHP, undang-undang khusus, regulasi dan ketentuan peraturan perundang- undang lainnya, sedangkan hukum pidana formil itu termasuk dalam hukum acara atau proses pelaksanaan hukum pidana materil. Hukum acara pidana telah mengambil ketentuan-ketentuan konstitusional sebagai dasarnya, yang

²⁶ A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017) hlm. 155

²⁷ E.Y. Kanter,dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2012) hlm. 20-21

menginginkan negara hukum dan suatu masyarakat yang didasarkan pada “*rule of law*”.²⁸

Wayne R. Lafave tidak menggunakan istilah hukum pidana materil dan hukum pidana formil melainkan menggunakan istilah hukum pidana substantif dan hukum pidana prosedural. Kendatipun tidak memberi definisi, namun **Lafave** menyatakan bahwa hukum pidana substansif memberi perhatian terhadap tindakan, *mental state* keadaan dan konsekuensinya beserta berbagai macam kejahatan. Sedangkan hukum pidana prosedural berawal dari penyidikan sampai pelaksanaan putusan.

Hukum pidana formil memiliki beberapa tujuan :²⁹

1. Mencari kebenaran materil
2. Melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga negara.
3. Orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula.
4. Mempertahankan sistem konstitusional terhadap pelanggaran kriminal.
5. Mempertahankan perdamaian, keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.

Dalam hukum pidana material, pembuat undang-undang menentukan, kelakuan mana adalah tindak pidana dan menetapkan sangsi-sangsi hukum pidana apakah yang berlaku atas tindakan-tindakan yang

²⁸ Oemar Seni, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), hlm. 82

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015) hlm. 18-19

dilakukan itu. Pertanyaan-pertanyaan bagaimana dan oleh siapakah yang akan diperiksa apabila dilakukan suatu tindak pidana, oleh siapa dan ukuran-ukuran pembuktian apakah tentang itu, dan ditentukan sangsi-sangsi hukum pidana yang disangkut pautkan terhadapnya, dan oleh siapa dan bagaimana putusan-putusan itu harus dilaksanakan, termasuk bidang-bidang hukum pidana formal. Pertanyaan-pertanyaan tentang bukti-bukti, termasuk bidang-bidang hukum acara pidana. Dengan demikian, istilah “pelaku”, lebih-lebih termasuk dalam pengertian hukum pidana materil; istilah-istilah seperti, “terdakwa” dan “terpidana” termasuk dalam suasana hukum acara pidana.³⁰

Terlepas dari pembagian hukum pidana formil maupun pidana materiil, bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang telah diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.³¹

B. Pembuktian Dalam Ranah Peradilan Pidana

Peradilan pidana merupakan proses hukum untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan terjadinya delik atau sebuah tindakan di muka persidangan.³²

³⁰ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1978), hlm.42

³¹ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Medis, 2014) hlm. 192

³² Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 34

Pembuktian dalam ranah peradilan pidana diatur dalam hukum pidana formil yang mencakup tentang segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan menggali fakta-fakta yang terdapat didalam persidangan.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan pokok persoalan atau dimaksud kata lain ialah menemukan kesesuaian atau kecocokan antara peristiwa pokok dengan akar-akar peristiwanya.³³

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Dengan melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai pasal 191 (1) KUHP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil, pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Sementara, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum pasal 191 (2) KUHP.

³³ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 59

Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah” kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”³⁴

Dalam hukum acara pidana juga dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut undang-undang, sistem tersebut terkandung dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Sistem negatif menurut undang-undang tersebut di atas, mempunyai maksud:³⁵

1). Untuk mempersalahkan seoraang terdakwa diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

2). Namun demikian, walaupun bukti bertumpuk-tumpuk, dan melebihi dua alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

³⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) hlm.48

³⁵ R. Subketi, *Hukum Pembuktian* (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2015), hlm 7

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:³⁶

- Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, apabila dengan hanya satu alat bukti belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan cepat, dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim.

Beberapa hal yang fundamental terkait suatu pembuktian. Ada empat hal yang terkait konsep pembuktian, yaitu :

1. Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses, artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran dari suatu peristiwa.
2. Suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*.
3. Hal yang disebut sebagai *exclusionary discretion rules* didefinisikan sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum.
4. Dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.

Adapun prinsip pembuktian yang digunakan:³⁷

³⁶ Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan* (Makassar: Alauddin University Pres, 2013), hlm. 135

³⁷ Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan* (Makassar: Alauddin University Pres, 2013), hlm. 135

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*).
2. Satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*).
3. Pengakuan dari keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah.

Maka sistem, pembuktian, adalah bagian yang dipotret oleh sub-sistem-sub-sistem peradilan pidana, untuk menerapkan kepastian dalam proses beracara, dan menerapkan makna pembuktian secara menyeluruh.³⁸

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yaitu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dapat dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.³⁹

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan di persidangan sebagai berikut :

³⁸ Syaiful Bahkri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 25

³⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hlm. 7-8

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah usaha untuk dapat meyakinkan hakim, yaitu berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau berkas dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya, untuk dapat meyakinkan hakim, yaitu berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, yaitu dengan adanya alat-alat bukti yang ada di dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum atau terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.⁴⁰

C. Alat Bukti

Menurut kamus hukum Alat bukti adalah segala hal yang menurut undang-undang dapat dipakai dalam membuktikan sesuatu di pengadilan.⁴¹

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan atau tindakan, dimana dengan alat-

⁴⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indoensia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) hlm. 51-52

⁴¹ M. Firdaus Sholihin – Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015) hlm. 9

alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴²

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan untuk mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan dapat boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁴³

Meskipun alat bukti dapat beraneka ragam bentuk, secara garis besar terdapat alat bukti yang berlaku universal untuk semua persidangan.⁴⁴

Alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Diluar alat bukti yang disebutkan, tidak dapat dibenarkan atau dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang dimana tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang

⁴² Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indoensia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) hlm. 50

⁴³ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap", *Yuridika*, Vol. 32 no. 1 (Januari 2017), h. 21. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4780> (Diakses 1 November 2019)

⁴⁴ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hlm. 55

mengikat. Yang dimana semua alat bukti tersebut harus saling berkaitan untuk membuat terang suatu perkara di pengadilan.

1. Keterangan Saksi

Dalam kamus hukum, keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang di dalam persidangan terkait suatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.⁴⁵

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. tidak ada perkara pidana yang dapat luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, “*the degree of evidence*” keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian (pasal 185 ayat 1 KUHP)⁴⁶. Menurut Ian Dennis, paling tidak ada lima hal terkait sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut.⁴⁷

⁴⁵ M. Firdaus Sholihin – Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015) hlm. 102

⁴⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indoensia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) hlm. 89

⁴⁷ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hlm. 57-

- *Kualitas pribadi saksi.* Terkait hal ini yang dimaksud adalah kualitas saksi dalam hubungannya dengan terdakwa atau salah satu pihak yang berperkara. Pada intinya terdapat larangan seseorang untuk menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi dikarenakan berbagai bentuk hubungan kekeluargaan, baik itu hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan. Selain itu, terdapat pula profesi-profesi tertentu yang dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi di pengadilan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia jabatan.
- *Terkait dengan hal yang diterangkan saksi.* Mengenai hal yang diterangkan saksi, ada dua hal yang menjadi poin perhatian, yakni substansi keterangan tersebut dan sumber pengetahuan saksi. Perihal substansi keterangan saksi, pada intinya isi dari keterangan saksi adalah fakta yang berhubungan/relevan dengan pembuktian tentang suatu peristiwa hukum yang sedang disidangkan. Dalam konteks perkara pidana, tentunya yang dipersaksikan berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang didakwakan, baik unsur-unsur tindak pidana maupun *locus* dan *tempus delicti*, serta kesalahan terdakwa yang meliputi keadaan batin terdakwa sebelum berbuat, kehendak, perbuatan, dan pengetahuan terdakwa. Keterangan saksi hanyalah mengenai fakta. Oleh karena itu, keterangan yang menyatakan pendapat ataupun rekaan yang

diperoleh dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan *ratio concludendi* bukanlah keterangan saksi.

- *Mengenai penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya.*
Artinya, segala sesuatu yang menjadi sebab (yang rasional dan dapat diterima akal sehat) seorang saksi melihat, mendengar, atau mengalami tentang peristiwa yang diterangkan saksi.
- *Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.* Hal ini dimaksud untuk dapat mencari kebenaran hakiki dalam suatu peristiwa hukum.
- *Menganai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau alat bukti lain.* Hal ini berkaitan dengan *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Secara prinsip *unus testis nullus testis* mengisyaratkan bahwa untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum membutuhkan lebih dari satu saksi. Kalaupun hanya terdapat satu saksi, kesaksian tersebut harus ada persesuaian dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, nilai pembuktian keterangan saksi tidak terletak pada banyaknya, tapi kualitasnya.

Berdasarkan tafsir *acontrario*, keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti lain, misalnya: satu keterangan saksi

ditambah keterangan terdakwa, satu keterangan saksi ditambah satu alat bukti surat.⁴⁸

2. Keterangan ahli

Dalam kamus hukum, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan pengalamannya memiliki keahlian pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis atau pendapat hukum lainnya mengenai alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan.⁴⁹ Dalam konteks hukum pembuktian yang dimaksud dengan ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.⁵⁰

Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan langsung dicatat dalam berita acara oleh panitera, dengan diucapkan diatas sumpah janji dan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterangan ahli merupakan salah satu ciri khas dari perkembangan hukum acara pidana modern sehingga sangat berguna untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.⁵¹

⁴⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indoensia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) hlm. 90

⁴⁹ M. Firdaus Sholihin – Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015) hlm. 102

⁵⁰ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hlm. 61

⁵¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indoensia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) hlm. 108

Pada prinsipnya nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, adalah: ⁵²

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*. Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya, tidak ada keharusan bagi hakim untuk harus menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
- b. Disamping itu berdasarkan prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal atau keadaan. Misalnya, apakah korban mati karena diracun atau dicekik, tetapi siapa pelakunya tidak dapat diungkapkan oleh keterangan ahli.

3. Surat

Dalam kamus hukum, surat adalah kertas yang bertuliskan (berbagai isi maksud di dalamnya). Secarik kertas (kartu) sebagai tanda atau

⁵² Koesparmono Irsan, & Armansyah, *Panduan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016) hlm. 256-257 & 259

keterangan yang tertulis. Tulisan tangan yang jelas maksud dan tujuannya (dibubuhi alamat, dsb).⁵³

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.⁵⁴

Dalam hukum Islam bukti tulisan atau surat adalah merupakan satu alat bukti, selain pengakuan dan saksi, bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Pentingnya bukti tulisan berdasarkan Q.S Al-Baqarah (2):282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ

Artinya:

⁵³ M. Firdaus Sholihin – Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015) hlm. 172

⁵⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indoensia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) hlm. 118

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”⁵⁵

Alat bukti tulisan surat dipersamakan dengan saksi, sebagai Nabi Muhammad, telah mengirimkan suratnya kepada Raja-Raja lainnya, dan menyampaikan argumentasi melalui surat-surat, dan beliau tidak memperlihatkan isi suratnya kepada yang diperintah untuk mengirimnya. Tidak pernah terjadi sekalipun sepanjang sejarah hidup beliau, menyerahkan surat yang telah disegelnya, dan memerintahkan untuk diserahkan kealamat yang dituju. Karenanya penulisan wasiat, merupakan bukti tulisan. Sehingga bukti tulisan dapat dinilai oleh Hakim, untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan, sehingga secara imperative sebagai bukti yang mengikat, sehingga bukti tulisan dapat dipandang sebagai bukti yang mengikat.⁵⁶

Jika kita berdasarkan pada pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah yaitu surat tersebut harus dibuat atas

⁵⁵ Kementrian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Insan Kamil, 2011) hlm. 48

⁵⁶ Syaiful Bahkri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 101-102

sumpah jabatan oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dikuatkan dengan sumpah.

KUHAP sama sekali tidak mengatur ketentuan khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat. Dalam hal ini hanya dapat dijelaskan secara teoritis saja serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP yaitu:⁵⁷

a. Ditinjau dari segi formal

Alat bukti surat yang disebut pada pasal 187 huruf a,b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna karena bentuk dari surat surat tersebut adalah resmi sesuai dengan formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ditinjau dari segi materiil

Jika ditinjau secara materiil maka semua alat bukti yang disebut dalam pasal 187 KUHAP bukanlah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas, seperti yang dipunyai oleh alat pembuktian keterangan saksi, alat pembuktian keterangan ahli. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, hakim dapat menggunakan atau menyingkirkannya.

⁵⁷ Koesparmono Irsan, & Armansyah, *Panduan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016) hlm. 266-267

4. Petunjuk

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam praktik, hendaknya digunakan dengan hati-hati karena sangat dekat dengan sifat kewenangan yang dominan dalam penilaian yang bersifat subjektif sekali. Oleh karenanya, hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus penuh kearifan dan bijaksana dan berdasarkan hati nurani. Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁵⁸

Untuk menghindari dominasi subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang sedini mungkin memperingatkan hakim, supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim: dengan arif lagi bijaksana, serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan perlu kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Selain itu hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Pasal 188 ayat 2 “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara “limitatif” ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2, menurut Pasal 188 ayat 2, petunjuk

⁵⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indoensia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) hlm. 134

hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.⁵⁹

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menduduki urutan terakhir sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan oleh dirinya sendiri sebagaimana disebut dalam pasal 189 ayat 3 KUHP.

Pengertian keterangan terdakwa adalah lebih luas dibanding dengan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju daripada pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat :⁶⁰

- a. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan
- b. Mengaku ia bersalah

Namun demikian, ada kemungkinan terdakwa memberikan pengakuan untuk sebagian :

- a. Terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan
- b. Tetapi ia tidak mengaku bersalah

Sedangkan menurut hukum acara pidana bisa dipisah-pisah, yakni :

⁵⁹ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KuHP”, *Yuridika*, Vol. 32 no. 1 (Januari 2017), h. 31-32. (Diakses 1 November 2019)

⁶⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indoensia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) hlm. 143-144

- a. Terdakwa benar melakukan delik yang didakwakan.
- b. Terdakwa mengaku bersalah, tetapi tidak sebesar yang didakwakan.

Oleh karena yang dilarang adalah perbuatannya, maka pemisahan pengakuan seperti itu tidak artinya. Paling-paling hanya merupakan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Namun jika dilihat dari keterangan terdakwa, hakim juga harus menimbang dengan disertai alat bukti yang lainnya dikarenakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.



BAB III

BUKTI TIDAK LANGSUNG ATAU *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* DAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA

A. Bukti Tidak Langsung atau Circumstantial Evidence

William R. Bell membagi bukti menjadi tujuh kategori.⁶¹

- *Direct evidence* atau bukti langsung, yaitu bukti yang secara langsung mengenai suatu fakta. Biasanya bukti ini diperoleh dari kesaksian seseorang yang melihat langsung fakta tersebut.
- *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, yaitu bukti yang secara tidak langsung mengenai suatu fakta, tetapi bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. Keduanya dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu fakta di persidangan.
- *Substitute evidence*, yaitu bukti yang tidak perlu dibuktikan secara langsung maupun tidak langsung karena menyangkut hal yang sudah menjadi pengetahuan umum atau pengetahuan hukum.
- *Testimonial evidence* atau bukti kesaksian, bukti kesaksian ini dibagi menjadi tiga, yaitu : (a) kesaksian atas fakta yang sesungguhnya (*factual testimony*); (b) pendapat atas kesaksian (*opinion testimony*); dan (c) pendapat ahli (*expert opinion*).

⁶¹ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hlm. 54-55

Factual evidence biasanya terkait kesaksian secara terbatas mengenai fakta-fakta yang relevan atas apa yang dilihat, didengar, atau dialami dan saksi bersumpah atas kesaksiannya itu bahwa dia benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Pada *opinion testimony*, saksi boleh memberikan pendapat mengenai kesaksiannya itu sendiri jika saksi adalah seorang ahli atau paham akan hal itu dan pengadilan merasa saksi adalah ahli atau paham akan hal itu dan pengadilan merasa saksi dibutuhkan agar hakim memahami perihal fakta tersebut. *Expert opinion*, yaitu untuk memberi interpretasi terhadap fakta dalam rangka meyakinkan hakim mengenai pemahaman terhadap suatu isu atas dasar fakta-fakta yang ada.

- *Real evidence*, yaitu objek fisik dari sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam beberapa literatur *real evidence* diartikan sama dengan *physical evidence* yang dalam konteks hukum pidana di Indonesia disebut dengan istilah 'barang bukti'.
- *Demonstrative evidence*, yaitu bukti yang digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta di depan pengadilan oleh penyidik. Dalam menjelaskannya penyidik menggunakan bagan yang diperoleh melalui rekonstruksi atau reka ulang atas suatu fakta. Dengan kata lain, rekonstruksi terhadap suatu kejahatan dikualifikasikan sebagai *demonstrative evidence*.

Documentary evidence, yaitu bukti yang meliputi tulisan tangan, surat, fotografi, transkrip rekaman dan alat bukti tertulis lainnya.

Circumstantial evidence merupakan suatu fakta yang bukan menjadi satu-satunya fakta yang terkait dengan suatu perkara, namun fakta tersebut berasal dari fakta-fakta yang berkaitan ataupun tidak dengan kasus tersebut, yang kemudian dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan dimaksud terkait dengan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu.⁶²

Menurut Max M. Houck, *circumstantial evidence* adalah bukti yang didasarkan pada suatu kesimpulan dan bukan dari suatu pengetahuan atau observasi. Sudah barang tentu *circumstantial evidence* tersebut harus disesuaikan dengan bukti-bukti lainnya. Atas dasar itulah Houck berpendapat bahwa tidak semua bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Dapat saja bukti yang satu mempunyai kedudukan yang lebih penting dari bukti yang lain, semuanya tergantung pada pembuktian suatu kasus di pengadilan.⁶³

Dalam KUHAP, tidak mengenal adanya *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini. Namun Yahya Harahap dalam bukunya yang dikhususkan untuk materi hukum acara perdata, berpendapat bahwa dari alat bukti yang ada pada Pasal 164 HIR, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Direct Evidence dan Indirect Evidence. Disebut direct evidence “karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan”. Disebut indirect evidence, karena “pembuktian yang diajukan

⁶² Mahmud Siregar, *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Volume 13 Nomor 2 (Juli-Desember 2018), hlm.192, (Diakses 11 November 2019)

⁶³ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hlm. 53

tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan”.⁶⁴

B. Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara

Putusan pengadilan atau lebih dikenal juga disebut putusan hakim, merupakan suatu hasil (*out put*) dari sebuah proses pemeriksaan perkara di dalam pengadilan. Kehadiran putusan sangat dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara di dalam pengadilan, dikarenakan dengan putusan tersebut para pihak berharap akan memperoleh kepastian dan juga keadilan atas perkara yang diajukan di pengadilan.⁶⁵

Kata ‘keadilan’, tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, kecocokan dengan undang-undang. Jika sebuah norma umum diterapkan pada satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul, maka dikatakan tidak adil, dan ketidakadilan tersebut terlepas dari beberapa pertimbangan nilai norma umum itu sendiri. Sesuati adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma.⁶⁶

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai

⁶⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 558.

⁶⁵ M. Syamsudin & Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 26

⁶⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2019) hlm.48

kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.⁶⁷

Dalam *Black Law Dictionary* dinyatakan bahwa:⁶⁸

“jurist as a public official appointed or elected to hear decide legal matters in court or judges is often used interchangeable with court”.

Jikalau diterjemahkan secara bebas:

“Hakim sebagai pejabat umum yang ditunjuk atau dipilih untuk mendengar keputusan hakim masalah pengadilan atau inisial hakim sering digunakan bergantian dengan pengadilan”.

Tugas hakim adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai Hakim. Hakim tidak boleh berpengaruh dengan keadaan disekelilingnya atau tekanan dari siapapun, dia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun.⁶⁹

Begitu pentingnya peranan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya, sehingga konsekuensi dari profesi hakim secara substansial dapat diartikan menjadi dua makna:⁷⁰

⁶⁷ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.169

⁶⁸ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm.64-65

⁶⁹ Nurlaila Harun, *Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 (Tahun 2017), hlm. 174 (Diakses 15 November 2019)

⁷⁰ Marwa Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3(Desember 2012), hlm. 287-288 (Diakses 15 November 2019)

- 1) Hakim merupakan profesi yang khusus, sehingga diberi perangkat khusus pula dalam bentuk kemandirian atau kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa. Pihak luar tidak dibenarkan campur tangan atas tugas-tugas peradilan yang diemban oleh hakim.
- 2) Kemandirian atau kemerdekaan, bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral atas putusan yang dijatuhkan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan Hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang, sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakkan hukum. Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim yang dibuat oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Selain itu definisi lain dari putusan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan,

pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi putusan Hakim adalah perbuatan atau tindakan Hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Putusan Hakim diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.⁷¹

Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis Hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan merupakan suatu pernyataan Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.⁷²

Musyawarah majelis Hakim tersebut dilaksanakan secara rahasia, artinya apa yang dihasilkan atau diperoleh dalam pertemuan majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara itu sampai putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁷³

Bambang Waluyo mengemukakan beberapa point tentang hal-hal atau faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana adalah sebagai berikut: Kesalahan pembuat tindak

⁷¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019), hlm. 118-119

⁷² Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 40-41

⁷³ Aristo M.A Pangaribuan & Arsa Mufti & Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 328

pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.⁷⁴

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:⁷⁵

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Macam-macam penjatuhan putusan majelis hakim dalam perkara pidana antara lain:⁷⁶

- a. Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah
- b. Dinyatakan tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah

⁷⁴ Efrem Luxiano Lado Leba, *Keyakinan Hakim Berdasarkan Alat Bukti Yang Cukup Untuk Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kdrt*, Naskah Publikasi (Tahun 2013), hlm. 5

⁷⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Kencana, 2018) hlm. 109-110

⁷⁶ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 203

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Circumstantial Evidance Atau Bukti Tidak Langsung Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Pidana.

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusannya terdapat dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”⁷⁷

Beberapa hal yang fundamental terkait suatu pembuktian. Ada empat hal terkait konsep pembuktian, yakni *pertama*, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses, artinya bukti

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 278-280

tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran dari suatu peristiwa. *Kedua*, suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. *Ketiga*, hal yang disebut sebagai *exclusionary direction rules* didefinisikan sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. *Keempat*, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.⁷⁸

Dalam teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Apa pun bentuknya, Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Kendatipun demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun perihal kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.⁷⁹

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHP:

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Terkait dengan pasal 1 angka 26 KUHP, seseorang yang mendengar peristiwa tersebut bisa dikatakan bukti tidak langsung atau

⁷⁸ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm. 25

⁷⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hlm. 52

circumstantial evidence. Pendapat yang dikemukakan juga oleh Phyllis B. Gerstenfeld terkait *circumstantial evidence* adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut. Misalnya seseorang yang mendengar bunyi tembakan, kemudian berlari ke arah tembakan tersebut dan sesampainya di sana, dia menemukan seseorang yang sedang memegang senjata api dan seorang lainnya yang telah tewas. Kesaksian orang yang mendengar bunyi tembakan tersebut adalah *circumstantial evidence* karena belum tentu orang yang didapatinya sedang memegang senjata api merupakan pembunuhnya. Untuk mengetahui, masih dibutuhkan pembuktian lebih lanjut.⁸⁰

Sedangkan menurut Hukum Islam, kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.

Kewajiban untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) 282 :

...وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

“Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil”⁸¹

Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan “pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak bagi

⁸⁰ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hlm. 53

⁸¹ <https://www.dusturuna.com/quran/2282/?hilite=%27al%27%2C%27baqarah%27%2C%27ayat%27%2C%27282%27>, Diakses Pada Hari Selasa, 14 Juli 2020

manusia.” Pemberitaan yang dimaksudkannya adalah pemberitaan yang berdasarkan keyakinan bukan perkiraan. Syarah kesaksian adalah identik dengan al – bayyinah yang artinya segala yang dapat menjelaskan perkara. Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksiannya senyatanya tanpa menyembunyikan sedikitpun.⁸² Kewajiban ini berdasarkan firman Allah S.W.T. Q.S Al-Maidah (5): 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.”⁸³

Maksudnya adalah jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah Swt. bukan karena manusia atau mencari popularitas. Dan jadilah kalian "menjadi saksi dengan adil" maksudnya secara adil dan bukan secara curang. Dan tegakkanlah kebenaran, keadilan itu terhadap orang lain meskipun kamu membencinya. Caranya adalah dengan menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dalam rangka mencari ridha Allah Swt.

شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Asy-syahadah (kesaksian) disini yang dimaksud menyatakan kebenaran kepada Hakim, supaya diputuskan hukum berdasarkan

⁸² <http://digilib.uinsby.ac.id/21190/5/Bab%202.pdf> diunduh padahari Selasa, 14 Juli 2020

⁸³ <https://www.dusturuna.com/quran/5-8/> diakses pada hari Selasa, 14 Juli 2020

kebenaran itu. Atau hakim itulah yang menyatakan kebenaran dengan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Jadi pada dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun peristiwa yang disaksikan, tak boleh berat sebelah, baik karena kerabat, harta ataupun pangkat, dan tak boleh meninggalkan keadilan, dikarenakan kefakiran atau kemiskinan.⁸⁴

Alat bukti petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung atau *Circumstantial Evidence*. Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 188 ayat (1) yang berbunyi “*petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*” Alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai mana diatur dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP. Kata “menandakan” di dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP, mempunyai pengertian bahwa alat bukti petunjuk tidak diperoleh kepastian mutlak. Kata “Peresesuaian” dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP, merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti, karena kesesuaian tersebut atau keadaan maka hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Syarat-syarat alat bukti petunjuk yaitu:⁸⁵

⁸⁴ <https://www.rasiyambumen.com/2017/01/asbabun-nuzul-surat-al-maidah-ayat-8.html>, Diakses Pada Tanggal Jumat 17 Juli 2020.

⁸⁵ Fransiska Lestari Simanjuntak, *Tesis: Penegakan Hukum Oleh Hakim Agung Republik Indonesia Dalam Menangani Kasasi Perkara Kartel Putusan KPPU Yang Mengguakan Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)*, (UNHAS: 2018)

- a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi, dan
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan.

Dalam Hukum Islam, petunjuk disebut *Qarinah* diambil dari kata “muqaranah ” yakni “ musabahah” (penyertaan atau petunjuk). Petunjuk tersebut kadang-kadang kuat atau lemah yaitu menurut kuat atau lemahnya penyertaan. Ukuran dalam menetapkan ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebijaksanaan. adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebutkan *Qarinah*. Meskipun *Qarinah* merupakan alat bukti namun tidak semua *Qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A. Rasyid memberikan beberapa kriteria *Qarinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya *Qarinah* tersebut harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *Qarinah* menurut undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam.⁸⁶

⁸⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/21190/5/Bab%202.pdf> diunduh padahari Mimgggu, 12 April 2020

Kemudian putusan MK 65/PUU-VII/2010 memperluas makna saksi menjadi: “Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.”⁸⁷

Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa.⁸⁸ keterangan saksi ini biasa disebut *testimonium de auditu*.

Testimonium de auditu atau *hearsay*, yakni mendengar kesaksian dari orang lain. Tegasnya, suatu hal fundamental bukti yang dapat diterima atau *admissible* pasti relevan, namun tidak sebaliknya, suatu bukti yang relevan belum tentu dapat diterima. Dalam *Encyclopedia of crime & justice*, *admissible evidence* didefinisikan sebagai lisan, tulisan, fotografi, atau bukti materiil lainnya yang dipertimbangkan oleh hakim untuk dapat diterima berdasarkan hukum pembuktian. Artinya, dapat atau tidak diterimanya suatu bukti didasari atas pertimbangan hakim.⁸⁹

⁸⁷ PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/ Tahun 2010

⁸⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dcb3732cca3/arti-itestimonium-de-auditui/> diakses pada hari Senin, 6 Januari 2020

⁸⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hlm. 10-

Didalam KUHAP memang tidak menjelaskan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*, tetapi dalam Putusan MK 65/PUU-VII/2010 sudah terdapat makna arti dari *circumstantial evidence*. Dan saksi *Testimonium de auditu* bisa dikatakan sebagai bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Keterangan saksi *Testimonium de auditu* sebenarnya dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam acara pidana.

Mengingat sistem hukum Indonesia adalah Civil Law, maka prinsip utamanya mempunyai kekuasaan mengikat, karena berupa peraturan yang terkodifikasi berbentuk undang-undang dan kepastian hukum menjadi tujuannya.⁹⁰

Bukti tidak langsung sebagai bukti yang disajikan di pengadilan tidak berasal langsung dari saksi mata atau peserta kejahatan. Ini bisa menjadi bukti fisik atau keadaan di mana penjelasan yang masuk akal dapat membuktikan bahwa bukti tidak langsung adalah faktor yang berkontribusi serta penjelasan tentang kejahatan.⁹¹

Dengan demikian, kedudukan *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana sangat signifikan. Jika ingin digunakan, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti yang dimaksud.

⁹⁰ Adam Bastian Mardhatillah, Ahmad Mahyani BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) Jurnal Volume 12 Nomor 1 (Februari 2019 – Juli 2019) hlm. 61

⁹¹ Cahya Wulandari, *Legal Analysis Of The Use Of Circumstantial Evidence Theory: Study Of The Supreme Court Decision Number 777/Pid.B/2016/ Pn Jakarta Pusat*, Yustisia Vol. 7 No. 1 (January – April 2018), hlm. 110 (Diakses Senin, 6 Januari 2020)

B. Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung. (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Kalau seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin.⁹²

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi untuk penegakkan hukum yang baik.⁹³

Dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya

⁹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm 94

⁹³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019), hlm. 120

sebagaimana dalam amar putusan (*strachmaat*), di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca alasan-alasan yang jelas mengenai tujuan putusan tersebut diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara. Bagian pertimbangan sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemootiveerd*) dapat menjadi alasan untuk diajukan suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan ada dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁹⁴

Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan disebut *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁹⁵

1. *Ratio Decidendi* dalam putusan membuntikan unsur delik

Terkait dengan kasus Mirna, yang orang ketahu dia seorang perempuan yang menjadi korban meminum kopi beracun di sebuah *café*. Perbincangan di *café* terhadap kasus kopi beracun, memberi kesan seolah-olah Jessica memang yang menaruh racun di kopi yang diminum Mirna.⁹⁶ Di dalam putusan Jessica Kumala Wongso yang didakwakan adalah dakwaan tunggal tindak pidana pembunuhan berencana, hakim telah sampai

⁹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm 111

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2017) hlm. 158

⁹⁶ Fadli Andi Natsif, *Ketika Hukum Ber-Bicara* (Jakarta: Prenada, 2018) hlm 56

kepada putusannya yang menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam putusannya untuk membuktikan unsur delik tersebut dengan mengkaitkannya dengan segala sesuatu yang berkorelasi antara keyakinan Hakim, fakta hukum, pendapat ahli dan peraturan hukum.

a) Unsur “barang siapa”

Bahwa hakim mempertimbangkan Jessica Kumala Wongso terpenuhi unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan mempertimbangkan, bahwa setelah terdakwa dihadapkan dipersidangan setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan. Dan bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat yang juga dikuatkan oleh ahli Psikiatri Forensik, bahwa dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda – tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum, bahkan menurut Majelis Hakim ketika terjadi

jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar serta menyatakan sadar pada saat kejadian perkara terjadi tertanggal sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa Jessica mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b) Unsur “dengan Sengaja”

Bahwa hakim mempertimbangkan Jessica Kumala Wongso terpenuhi unsur “dengan sengaja” untuk melakukan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan mempertimbangkan Majelis Hakim berpendapat perlu diketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai “motif”. Menurut Majelis Hakim sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Berbeda dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, memiliki 3 (tiga) karakteristik, Pertama: pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua: ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga: pelaksanaan kehendak dilakukan

dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya. Bahwa dari hasil pemeriksaan sidang Pengadilan setelah diperiksa alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut yang didahului adanya MOTIF atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan adanya keterangan saksi Arief (suami korban), saksi Kristie, saksi Dermawan Salihin (orang tua korban) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) bulan ditahun 2015, Terdakwa mengalami depresi, suka mabuk-mabok dengan minum beralkohol tinggi. Menabrak rumah panti jompo, Terdakwa juga berulang kali mengancam dan mencoba bunuh diri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Alfred (RSRPA) karena mencoba melukai/menyayat tangannya, mencoba meracuni dirinya dengan gas CO dengan memasukkan pemanggang barbeque (BBQ)

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta terlihat bahwa sesungguhnya Jessica mengalami ketidakstabilan emosi berupa agresifitas yang awalnya ditujukan kepada dirinya sendiri berupa berulang kali mencoba bunuh diri dan berperilaku impulsif dengan meminum alkohol berlebih yang berpotensi melukai orang lain (menabrak rumah panti jompo), kemudian terlihat adanya peningkatan emosional berupa ancaman kepada orang lain yang dekat dengannya

yang diharapkan dapat menolongnya, namun dipersepsikan tidak menolongnya sesuai keinginannya.

Hakim mempertimbangkan, bahwa fakta dan pertimbangan diperkuat oleh ahli psikiatri forensik dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang mengatakan bahwa “kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang adekuat”.Pendapat ini juga diperkuat oleh hasil Kesimpulan Visum et Repertum Psychiatrikum Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog klinis. Bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica.

Setelah unsur motif terpenuhi, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dengan pertimbangan bahwa jika sampai sekarang terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dapat mematahkan penyangkalan Terdakwa tersebut. Terdakwa lupa dengan penjelasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Bahkan sekalipun terdakwa tidak mengakui

sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (Pasal 189 ayat (4) KUHAP).

Hakim mempertimbangkan kesengajaan Terdakwa Jessica berawal dari motif rasa sakit hati dan dendam kepada korban Mirna, Jessica sering menghubungi Mirna setelah pertemuan mereka bersama suami Mirna. Kemudian Jessica menyuruh Mirna untuk membuat group bersama teman-temannya yakni Saksi Hanie dan saksi Vera untuk merencanakan pertemuan di Café Olivier. Jessica menyampaikan digroup bahwa dia akan lebih awal datang untuk memesan tempat. Jessica juga langsung berinisiatif untuk memesan Vietnemes Ice Coffee (VIC) untuk Mirna, yang akhirnya disetujui korban Mirna. Kemudian Jessica datang lebih awal ke café Olivier sekitar pukul ± 15.30 WIB dan langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (no smoking area) kepada Saksi Cindy yang bertugas sebagai resepsionis Cafe Olivier dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Cafe Olivier untuk melihat-lihat keadaan di dalam Cafe Olivier tersebut dan mencari tempat duduk yang dipandang lebih nyaman yang bisa terhindar dari jarak dekat pandangan CCTV, lalu keluar sebentar memesan paper bag dengan hanya membeli 3 (tiga) buah sabun cuci tangan untuk dipergunakan sebagai hadiah kepada ketiga rekanrekannya yang sudah lama tidak bertemu, kemudian setelah datang kembali Jessica membawa papir bag langsung meletakkan

paper bag tersebut diatas meja No 54 dengan tujuan untuk menutupi gelas kopi yang sudah dipersiapkan untuk itu.

Jessica dengan sengaja hanya memesan satu gelas minuman Vietnammise Ice Cofee (VIC) untuk Mirna sebagai balasan jamuan makan malam yang pernah ditraktir oleh Mirna dan saksi Arief tertanggal 8 Desember 2015. Anehnya terdakwa memesan 2 (dua) gelas minuman coctail berdosis alkohol tinggi jenis Sazerac dan Old Fashion untuk priayang diperuntukkan untuk diri Terdakwa sendiri dan langsung diminumnya habis tanpa menunggu temannya Mirna datang. Jessica tidak fokus memesan makanan tambahan semacam camilan dan sebelum menu disajikan, terdakwa sudah langsung melakukan pembayaran (close bill) atas menu tersebut, maksudnya untuk mempermudah setelah perbuatan jahat itu selesai dilakukan Jessica bisa langsung meninggalkan tempat kejadian. Menariknya ternyata Jessica tidak menduga kalau saksi Hanie ikut datang menemani Mirna.

Bahwa pertimbangan menurut Majelis Hakim jika ada maksud baik dari Jessica selaku teman yang sudah lama tidak bertemu, seharusnya mereka sama – sama datang kelokasi atau bertemu di cafe Olivier tanpa harus memesan terlebih dahulu menu kopi tersebut. Buktinya ketika Mirna datang ke lokasi meja 54 Mirna sempat bertanya kepada Jessica tentang minuman yang sudah telah dipesan sebelumnya oleh Jessica, kemudian MIRNA langsung mengambil minuman VIC dan mengaduk kopi sebentar dengan sedotan yang sudah ada didalam gelas, kemudian

meminum dengan menggunakan sedotan. Dan terbukti tidak lama setelah meminum VIC tersebut langsung korban Mirna koleps karena didalam VIC diduga telah ditambahkan natrium NaCN Sianida, dan sebagai bukti kepuasan dendam tersebut. Untuk mempertimbangkan tidak ada saksi yang melihat Jessica yang memasukkan Natrium Sianida kedalam gelas VIC, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual oleh karena selama kurang lebih 51 menit sejak minuman VIC disajikan saksi Agus Triyono hingga datangnya saksi Hanie dan Mirna duduk di meja 54 hanya Jessica lah yang menguasai VIC dimeja 54, maka sesuai menurut hati nurani Majelis Hakim, Jessica sangat mengetahui dan mengamati siapa yang memasukkan sesuatu kedalam VIC, Jessica sangat mengetahui siapa yang mengeser-geser gelas kopi dari ujung sofa hingga ke tengah sofa dimana nantinya tempat duduk korban Mirna, hingga misalnya lalat yang hinggap kedalam gelas kopi tersebut Jessica sangat mengetahuinya. Itu sebabnya ketika Mirna belum datang, Jessica tampak gelisah seperti yang terlihat di gambar CCTV, karena apabila Mirna tidak jadi datang atau bersamaan datangnya dengan teman-temannya yang lain seperti saksi Hanie, korban Mirna dan saksi Vera pastilah rencana jahat Jessica akan berantakan. Buktinya ketika saksi Hanie turut datang bersama korban Mirna yang sebelumnya tak diduga Jessica.

Hakim menimbang bahwa selanjutnya untuk mengetahui adanya unsur sengaja tersebut dapat diketahui 1 (satu) hari setelah Mirna meninggal dunia terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandy (kembaran

Mirna, saksi Sandy menerima SMS dari Jessica, secara terus-menerus menanyakan apa hasil laboratorium forensic (labfor) terhadap lambungnya Mirna, karena saksi Sandy belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan Jessica. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Jessica telah terbukti dengan sengaja merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Jika misal diketahui penyebab kematian itu dari racun sianida, akan menjadi masalah besar kepada Jessica. Akan tetapi jika tidak terbukti karena sianida, maka kesempatan terbaik bagi dirinya telah berhasil mengelabui masyarakat kalau penyebab kematian itu bukan akibat sianida dan adanya kiriman link Jessica kepada saksi Sandy melalui SMS yaitu <http://m.detik.com/food/read/2016/01/03/130159/3109527/297/kopi-palsu-yangberpotensi-mengandung-racun-dijual-di-vietnam> setelah korban Mirna meninggal dunia. Dari bukti ini Saksi Sandy tidak terpikirkan kalau korban Mirna mati karena di racun. Petunjuk ini menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk mematikan korban Mirna melalui racun sianida.

c) Unsur “direncanakan terlebih dahulu”

Bahwa hakim mempertimbangkan Jessica Kumala Wongso terpenuhi unsur “direncanakan terlebih dahulu” untuk melakukan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Majelis hakim menimbang dari penyampaian ahli pidana Prof. Dr. Edwar Omar Sharif Hiariej,SH.,MHum.,dipersidangan dengan mengutip literatur hukum Jerman mengatakan bahwa dolus premeditatus disebut sebagai beratene mut yang mensyaratkan tiga hal, yakni:**Pertama**, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. **Kedua**, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. **Ketiga**, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr.Jur Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur voorbedachten rade (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dengan itu, majelis hakim berpendapat bahwa pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Artinya jika seseorang ingin membunuh orang lain dengan menggunakan racun, maka pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah memiliki konsep racun apa yang tepat digunakan untuk mematikan orang tersebut dengan segera, dan racun tersebut akan dicampurkan dengan apa, lalu bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan.

Majelis hakim mempertimbangkan **akan mengacu kepada pemahaman dari hati nurani Hakim dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli yang relevan.**

Bahwa selanjutnya majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yang sudah dijelaskan diatas dapat dikualifikasi telah dapat konstatir telah terjadi perencanaan sebelum dilakukan pembunuhan melalui racun sianida (NaCN). Bahwa berdasarkan fakta, Majelis hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa untuk melampiaskan rasa sakit hati dan dendam tersebut kepada korban Mirna, ternyata sebelum waktu/peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa Jessica telah dengan sengaja “merencanakan waktu yang tenang untuk memikirkan secara tepat untuk datang terlebih dahulu ke cafe Olivier dengan dalih supaya tidak terkena macet dan akhirnya sekitar pukul 15.29 WibTerdakwa tiba di café Olivier.

Bahwa dari rentang waktu sejak Terdakwa tiba di cafe Olivier Terdakwa merencanakan dengan mencari tempat duduk yang dipandang lebih nyaman terhindar dari jarak dekat sorotan CCTV no 7 dan 9. Begitu pentingnya acara tersebut bagi terdakwa, hingga akhirnya terdakwa hanya memesan minuman VIC satu gelas tanpa memesan makanan tambahan semacam camilan. Jika minuman VIC satu gelas tersebut dipakai alasan sebagai balas budi karena sebelumnya korban Mirna dan suaminya saksi Arief pernah mentraktir makan malam Jessica di Bumbu den Kelapa Gading tertanggal 8 Desember 2015 menurut Majelis Hakim

tidaklah tepat, terlebih sebelum minuman VIC satu gelas untuk Mirna disajikan kemeja 54, terdakwa sudah langsung melakukan pembayaran (close bill) sementara korban Mirna belum datang ketempat tujuan adalah menjadi satu keanehan ada apa semua dibalik peristiwa tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa Bukankah dalam kelaziman pergaulan dan persahabatan jika kita hendak samasama makan dan atau minum sebaiknya sebelum orangnya belum datang, maka makanan terkait tidak usah dihidangkan dulu, karena jika menu sudah disiapkan (siap saji), maka menu tersebut menjadi kurang segar untuk dinikmati

Majelis hakim menimbang bahwa sebagai bukti bahwa terdakwa sudah merencanakan pembunuhan ini secara matang sekalipun waktunya tidak terlalu jauh rentang waktunya sebagaimana pendapat ahli pidana Prof. Dr. jur Andi Hamzah mengatakan “dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan”, maka dari perencanaan Terdakwa terlihat bagaimana strateginya Terdakwa mengatur waktu yang sedemikian singkat (antara pukul 16.29 – pukul 17.02 Wib) mengatur semua rencana jahat tersebut dengan memanfaatkan acara pertemuan reunion dengan teman-temannya seperti Mirna, Hanie, dan Vera sebelum pukul 18.00-19.00 Wib dimanfaatkannya waktu seefisien mungkin melakukan pertemuan antara Terdakwa dengan korban Mirna dengan memesan satu gelas VIC ditempat yang sama demi untuk melampiaskan perasaan sakit hati dan

dendam, akibat kepribadian (kehidupan Terdakwa yang sudah merasa hancur selama ini di Australia, lalu dilampiaskannya kepada korban Mirna yang baru saja menikmati mahligai rumah tangganya dengan saksi Arief.

Untuk memuluskan rencana tersebut, terpaksa Terdakwa menghubungi korban Mirna untuk ketemuan lebih dahulu, karena Terdakwa menduga saksi lain seperti Vera sesuai WAnyanya kepada Jessica akan tiba di café Olivier sekitar pukul 18.00 Wib, sedangkan menurut Jessica tidak menduga kalau saksi Hanie ikut datang bersamaan dengan Mirna, karena pertemuan antara Jessica dan Mirna sengaja discenariokan oleh Terdakwa. Karena sesuai percakapan dengan WA terdakwa menduga bertemu berempat, (kecuali korban Mirna) di cafe Olivier untuk acara reunion sesama kuliah di Australia sekitar pukul 18.00 Wib untuk makan bersama, bukan sendiri-sendiri seperti halnya pertemuan Jessica secara khusus dengan Mirna. Hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya Terdakwa secara khusus telah terbukti merencanakan dengan niat jahat untuk mematikan korban Mirna lewat minuman VIC.

Bahwa dengan hadirnya saksi Hanie diacara tersebut, terlihat terdakwa tidak focus, gugup yang mana lebih dahulu dipeluk diantara kedua temannya itu. Apakah saksi Hanie atau korban Mirna. Sementara yang kita lihat ditayangkan CCTV 7 yang lebih dahulu berpelukan cipika-cipiki dengan Terdakwa adalah saksi Hanie, baru kemudian korban Mirna yang terlihat ada sedikit jarak pelukan itu dari pihak korban Mirna.

Membuktikan bahwa diantara Mirna dan Jessica ada hubungan tidak baik dan tidak harmonis sesuai fakta dalam persidangan dan hal ini dikuatkan oleh ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara.

Bahwa sebagaimana dipertanyakan oleh Majelis hakim dipersidangan, jika korban Mirna belum datang atau terlambat datang mengapa harus cemas-cemas, paling banter kopinya diganti karena kopinya sudah tidak segar lagi, harga segelas kopi tidak seberapa, apakah karena ada sesuatu didalam kopi tersebut, tanya hakim? Dijawab oleh terdakwa tidak ada yang mulia, dengan jawaban itu telah menimbulkan pertanyaan besar bagi Majelis Hakim yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Rasa cemas-cemas dan mengharap kedatangan Mirna ini jangan sampai tidak datang. Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara yang menyimpulkan bahwa dari hasil pengamatan CCTV ditemukan bahasa tubuh Terdakwa menunjukkan ketegangan dan kecemasan sebelum saksi Hanie dan korban Mirna tiba di meja 54. Menurut Majelis hakim hal ini membuktikan Terdakwa menanti sesuatu yang amat diharapkannya terjadi, apakah akan berhasil atau tidak rencana jahat yang sudah dimasukkan sebelumnya didalam kopi Mirna tersebut. Majelis hakim menimbang bahwa jika ada niatan baik Terdakwa kepada korban Mirna selaku teman Terdakwa, mestinya terdakwa tidak perlu bersusah payah harus lebih dahulu datang ke cafe Olivier dengan memesan hanya satu gelas minuman VIC untuk korban Mirna saja, hingga dengan sengaja membeli 3 (tiga) buah sabun pencuci tangan yang

dibungkus dengan paper bag, yang menurut Majelis Hakim sabun cuci tangan tersebut sangat tidak wajar menjadi hadiah bagi pertemanan sesama teman mahasiswa, yang semuanya itu menurut Majelis hanyalah sebagai petunjuk untuk menutupi gelas kopi ketika Terdakwa memasukkan racun sianida yang diperkirakan dimasukkan kedalam gelas tersebut ketika Terdakwa memastikan kapan sampainya korban Mirna tiba di cafe Olivier sesuai hasil telepon/WA antara Terdakwa dengan korban Mirna, dan pada saat itulah Terdakwa sibuk melakukan pergerakan gestur tubuh, pindah posisi duduk dari ujung sofa hingga pindah ketengah sofa yang terhalang oleh taman hias dedaunan, yang akhirnya posisi duduk Terdakwa berpindah ketempat semula (ujung sofa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terjadi skenario Terdakwa untuk mengelabui dan mensiasati supaya tidak diketahui oleh pengunjung cafe Olivier, siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan korban Mirna ini. Majelis Hakim melihat peristiwa ini dengan menggunakan nalar dan hati nurani yang mendalam, bahwa sesungguhnya tidak ada orang lain yang memasukkan racun Sianida (NaCn) di kopi Mirna selain terdakwa sendiri, seperti yang sudah dipertimbangkan diatas.

Bahwa jika dikaitkan dengan voorstellingstheorie tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka ternyata Terdakwa sudah memiliki gambaran atau bayangan untuk mewujudkan rumusan

delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP, sebab terbukti ketika Terdakwa berencana membunuh korban, ternyata terdakwa sebelumnyatelah terlebih dahulu mempersiapkan dan menggunakan racun sianida (NaCN) untuk dimasukkan kedalam gelas kopi Mirna sebelum korban datang ketempat kejadian. Hal ini dapat diketahui 1 (satu) hari setelah Mirna meninggal dunia terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandy (kembaran Mirna) yakni pada tanggal 7 Januari 2016, saksi Sandy menerima SMS dari terdakwa, secara terusmenerus menanyakan apa hasil laboratorium forensic (labfor) terhadap lambungnya Mirna, karena saksi Sandy belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Jika misalnya diketahui penyebab kematian itu dari racun sianida, akan menjadi masalah besar kepada Jessica. Akan tetapi jika tidak terbukti karena sianida, maka kesempatan terbaik bagi dirinya telah berhasil mengelabui masyarakat kalau penyebab kematian itu bukan akibat sianida. Selanjutnya denganadanya kirimanlink Terdakwa kepada saksi Sandy melalui SMS yaitu <http://m.detik.com/food/read/2016/01/03/130159/3109527/297/kopi-palsu-yangberpotensi-mengandung-racun-dijual-divietnam>, setelahkorban Mirna meninggal dunia, telah menjadi petunjuk bagi

Majelis Hakim bahwa korban Mirna meninggal dunia akibat racun sianida.

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas merupakan pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah memiliki konsep racun yang tepat digunakan untuk mematikan Mirna segera dan ternyata racun tersebut telah berhasil dicampurkan dengan minuman VIC yang disukai korban Mirna, sedangkan bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan, ternyata sudah diatur Terdakwa seefektif mungkin, yakni dengan cara menyusun tiga buah paper bag sedemikian rupa diatas meja 54 untuk menutupi gelas yang didalamnya akan dimasukkan racun tersebut, sedangkan kapan dimasukkan racun tersebut tentunya terdakwa sangat mengetahui kapan dipastikan kedatangan korban Mirna ke tempat kejadian sesuai percakapan WA seperti telah disebutkan diatas, maka pada rentang waktu itulah dimasukkan racun tersebut dan tempatnya sudah dipersiapkan sebelumnya di café Olivier sesuai percakapan dalam WA. Hal itu terbukti ketika korban Mirna datang bersama saksi Hanie, maka seketika korban Mirna meminum kopi lewat sedotanyang sudah dimasukkan Jessica terlebih dahulu didalam gelas, langsung mulut Mirna terasa panas hingga mengibas-ngibaskan tangannya kemulutnya menyebabkan korban Mirna koleps, membuktikan bahwa didalam gelas kopi tersebut telah bercampur sebelumnya racun sianida (NaCN). Dan bahwa benar setelah meninggalnya korban Mirna, terdakwa telah

mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum terkait meninggalnya korban dengan membuat catatan (notes) pada Hp Iphone 5 warna silver miliknya pada tanggal 11 Januari 2016 sesuai fakta hukum diatas.

d) Unsur “merampas nyawa orang lain”

Bahwa hakim mempertimbangkan Jessica Kumala Wongso terpenuhi unsur “merampas nyawa orang lain” untuk melakukan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini terdakwa diduga melakukan pembunuhan melalui minum racun yang dicampur dalam vietnamesse ice coffe (VIC), sehingga perlu dipertanyakan untuk dijawab, **pertama:** Apakah benar VIC yang dipesan Terdakwa Jessica mengandung racun Sianida (NaCn)? **Kedua:** Apakah benar racun Sianida (NaCn) yang ditemukan didalam tubuh korban Mirna sama dengan yang terkandung didalam VIC, hingga menyebabkan korban Mirna meninggal dunia?

Bahwa pertanyaan ini perlu dijawab dengan benar, sebab apabila pertanyaan ini dapat terjawab dengan benar, berarti dapat dipastikan bahwa meninggalnya korban Mirna adalah disebabkan karena racun sianida (NaCN).

Untuk menjawab pertanyaan pertama, majelis hakim menimbang bahwa Mirna bersedia diundang Jessica minum vietnamese ice coffee (VIC) di café Olivier tertanggal 6 Januari 2016, karena selain Mirna dan Jessica

sangat menyukai kopi, juga karena VIC rasanya enak. Jika Mirna tidak suka kopi tidak mungkin bersedia dipesankan minuman VIC oleh Jessica. Namun yang menjadi persoalan mengapa minuman VIC kesukaan Mirna tersebut ketika diminum Mirna bermasalah, artinya sesaat minuman VIC tersebut diaduk Mirna, lalu diteguk sekali sedot dari gelas VIC, langsung Mirna merasakan ada sesuatu yang tidak enak didalam minuman VIC dengan mengatakan *its ouwful* seperti yang diterangkan saksi Hanie, bahkan korban Mirna sempat menyerahkan gelas kopi itu dihadapan Jessica untuk dicicipi rasa enak atau tidak, namun terdakwa tidak bersedia mencicipinya, karena takut dampak kopi setelah Jessica minum dua minuman cocktail beralkohol tinggi, akhirnya Jessica hanya mencium baunya tidak enak, berbeda baunya harumnya ketika pertama saksi Agus Triyono menghidangkannya didepan Jessica yang mengatakan bahwa baunya strong banget, kemudian bahwa oleh karena saksi Hanie merasa penasaran dengan kopi tersebut langsung mencicipinya, ternyata benar rasa kopinya pahit, parah dan merasa panas di lidah dan terbukti hanya hitungan detik Mirna meminum kopi tersebut, langsung Mirna mengkibas-kibas mulut pakai tangannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa minuman VIC yang dipesan oleh Jessica adalah mengandung racun natrium sianida (NaCN).

Untuk menjawab pertanyaan kedua, majelis hakim menimbang bahwa untuk mengetahui apakah benar NaCN Sianida terdapat ditubuh dan atau

dilambung korban Mirna, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan Visum et Repertum dan daftar barang bukti (BB) dan yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk dianalisis adalah BB II sebagaimana disampaikan oleh Kombes Pol.Dr. Nursamran Subandi, M.Si., ditemukan kadar Ion CN- sebesar 7.900 mg/l. Menurut Majelis Hakim, maka kandungan Ion Sianida tersebut setara dengan:

$$(\text{Berat Molekul NaCN} : \text{Berat Atom CN-}) \times \text{kandungan Ion Sianida} = 49,01 : 26,02 \times 7.900 \text{ mg/l} = 14,88 \text{ gram/liter Natrium Sianida (NaCN)}.$$

Ini berarti berdasarkan keterangan saksi Hanie dan terdakwa sendiri bahwa korban minum sekali sedotan melalui sedotan plastik yang menurut percobaan sesuai Berita Acara Pengujian Penambahan Sianida pada Minuman ICE VIETNAMESE COFFE (VIC) No, Lab: 841/KTF/2016 tertanggal 15 Maret 2016, bahwa volume rata-rata satu sedotan = 19,995 ml (dibulatkan menjadi 20 ml), sehingga jumlah NaCN yang terkandung didalam cairan VIC yang diminum korban = 0,0149 gram/ml x 20 ml = 0,298 gram NaCN = 298 milligram(mg). bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat membenarkan masuknya kadar NaCN Sianida ketubuh Mirna sebesar 298 mg/l jauh lebih besar dari Lethal Dosis (batas dosis yang mematikan) yang hanya 171, 42 mg/l untuk berat badan manusia dengan bobot 60 kg. Hal ini didasarkan pada Literatur : Lewis J.R (ed), 1996, "Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials", 9th, USA, hal. 2956 – 2959.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan BB V setelah ahli Patologi Forensik dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM melakukan pemeriksaan luar dan pengambilan sampel lambung untuk pemeriksaan toksikologi korban Mirna dan dari lambung tersebut ditemukan kandungan Sianidanya di Puslabfor Bareskrim Polri sisa 0,2 mg/l, menurut Majelis Hakim sisa sianida yang terdapat didalam lambung tersebut adalah sisa sianida yang masuk melalui mulut korban dan terserap disepanjang saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan hingga ke lambung. Hal ini terbukti terjadinya iritasi pada bibir dan pada lambung. Kemudian menurut ahli toksikologi Dr. rer.net. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si.Apt, bahwa pengurangan kandungan sianida dilambung disebabkan oleh terjadinya reaksi netralisasi antara asam lambung (HCl) dengan natrium sianida yang masuk melalui mulut korban. Reaksi netralisasi tersebut diatas juga ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan pH isi lambung menjadi sekitar 5,5, dimana nilai pH normal isi lambung biasanya sekitar 1-3. Dengan terjadinya penyerapan pada organ tersebut, dan adanya netralisasi oleh asam lambung, maka akan terjadi pengurangan kandungan sianida yang sangat drastis di lambung korban sesuai BB V (sebesar 0,2 mg/l).

Menimbang, bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa mempermasalahkan bahwa matinya korban Mirna kemungkinan besar karena penyakit lain atau bawaan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa argumentasi hukum tersebut tidaklah benar. Karena menurut ahli

Forensik Patologi dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM dan ahli Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, DFM, SH harus ada gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh korban. Hal ini dibuktikan dari fakta keterangan suami korban (saksi Arief) dan ayah korban (saksi Dermawan Salihin) kalau Mirna tidak pernah memiliki penyakit lama, sekaligus membuktikan bahwa dalam lambung Mirna tidak ada kelainan atau penyakit.

Menimbang, bahwa menurut ahli Patologi dr. Slamet Purnomo, Sp, F.DFM yang dituangkan dalam Berita Acara untuk mendiagnosa apakah seseorang korban akibat keracunan dapat diidentifikasi dari tanda dan gejala sebelum korban meminum kopi dan gejala sesaat setelah minum dan kecepatan proses kematiannya disertai dengan adanya temuan-temuan pemeriksaan laboratorium forensik. Bahwa fakta membuktikan jika diperhatikan minuman VIC yang telah diminum oleh korban terbukti mengandung racun natrium sianida (NaCN) dengan kadar yang tinggi (7.900 mg/l) dan bersifat sangat korosif. Hal ini bersesuaian dengan kondisi mulut korban dimana didalam bibir berubah warna seperti terbakar, lidah terasa panas, perih mengakibatkan Mirna mengibaskan tangannya kemulut, sebagaimana diterangkan saksi Hanie dan terlihat pada rekaman CCTV dan hal ini juga dialami oleh saksi Hanie dan saksi Devi serta saksi lain dari petugas café Olivier yang juga ikut mencicipi minuman VIC tersebut. Menimbang, bahwa akibat gejala tersebut mengakibatkan korban Mirna kesulitan bernafas, kejang-kejang, mengeluarkan liur dari mulut hingga Mirna bersandar kesofa dan tidak

sadarkan diri hingga korban dibawa ke Rumah Sakit dan tidak lama kemudian korban Mirna meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari RS. Abdi Waluyo tertanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, semua gejala ini bersesuaian dengan gejala keracunan sianida seperti yang dijelaskan oleh para ahli toksikologi dan patologi (baik dari pihak Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa) sebagaimana terdapat dalam BAP.

Majelis Hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh efek toksik (racun) Sianida. Dengan terbuktinya natrium sianida ditubuh Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil (0,2 mg/l dilambung), maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg/l yang terdapat dilambung korban, sudah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik (racun) sianida (NaCN). Hal ini diperkuat oleh adanya Visum E Repertum No. Pol : R/007/I/2016/Rumkit. Bhay.Tk.I., tanggal 10 Januari 2016 dari Labfor Bareskrim Polri. Dengan demikian pendapat hukum para ahli dari Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan Natrium Sianida haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, karena ternyata telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan kedalam VIC dan

yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Analisa Kasus

Pada kasus ini Majelis hakim sulit mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa, yang harus dibuktikan, motif atau latar belakang tersebut berkaitan dengan kasus pembunuhan Mirna. Maka majelis hakim membuktikan suatu peristiwa kasus pembunuhan Mirna, dibuktikan terlebih dahulu motif atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu berupa saksi *Testimonium de auditu* keterangan saksi Arief (suami korban), saksi Kristie, saksi Dermawan Salihin (orang tua korban) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan diperkuat oleh keterangan ahli psikiatri forensik dr. Natalia Wideasih, SpKJ yang mengatakan bahwa “kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang adekuat” dan diperkuat oleh surat hasil Visum et Repertum Psychiatrikum Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016. Majelis hakim berkeyakinan karena selama kurang lebih 51 menit sejak minuman

VIC disajikan, Jessica yang menguasainya di meja 54 dengan diperkuat rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk.

Majelis hakim mempertimbangkan mengacu kepada pemahaman dari hati nurani Hakim dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli yang relevan, seperti penyampaian ahli pidana Prof. Dr. Edwar Omar Sharif Hiariej, SH., MHum., dipersidangan yang sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Jur Andi Hamzah. Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara yang menyimpulkan bahwa dari hasil pengamatan alat bukti petunjuk CCTV ditemukan bahasa tubuh Terdakwa menunjukkan ketegangan dan kecemasan sebelum saksi Hanie dan korban Mirna tiba di meja 54.

Majelis Hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh efek toksik (racun) Sianida. Hal ini bersesuaian dengan kondisi mulut korban dimana didalam bibir berubah warna seperti terbakar, lidah terasa panas, perih mengakibatkan Mirna mengibaskan tangannya kemulut, sebagaimana diterangkan saksi Hanie dan terlihat pada rekaman CCTV dan hal ini juga dialami oleh saksi Hanie dan saksi Devi serta saksi lain dari petugas café Olivier yang juga ikut mencicipi minuman VIC tersebut. Terkait dengan penyakit yang diderita korban Mirna, Menurut ahli Forensik Patologi dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM dan ahli Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, DFM, SH harus ada gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh korban. Hal ini dibuktikan dari fakta keterangan suami korban (saksi Arief) dan ayah korban (saksi Dermawan Salihin) kalau

Mirna tidak pernah memiliki penyakit lama, sekaligus membuktikan bahwa dalam lambung Mirna tidak ada kelainan atau penyakit.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. *Circumstantial evidence* adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut. Yang dapat dikatakan sebagai alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu saksi yang mendengar, saksi *Testimonium de auditu*, dan alat bukti petunjuk.
2. Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar *Circumstantial Evidence* Atau Bukti Tidak Langsung pada Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso, Majelis hakim sulit mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Maka majelis hakim membuktikan suatu peristiwa kasus pembunuhan Mirna, dibuktikan terlebih dahulu motif atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut dan motif atau latar belakang tersebut berkaitan dengan kasus pembunuhan Mirna. Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu berupa saksi *Testimonium*

de auditu, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan dan berupa alat bukti surat berupa surat visum, dan screenshot chat.

Dengan ini keyakinan hakim timbul dengan sudah berdasarkan dua alat bukti yang sah berdasarkan pasal 183 KUHP.

B. Implikasi Penelitian

1. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam proses pembuktian karena di khawatirkan dapat mengganggu validitas dari alat bukti yang lainnya, jadi seharusnya diatur lebih rigid.
2. Bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* biasanya digunakan dalam hukum perdata yang berkaitan dengan ganti kerugian, sedangkan dalam hukum pidana berkaitan pembatasan hak asasi manusia sehingga penggunaan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* rentan melanggar hak asasi manusia dari terdakwa, dimana proses pembuktian itu benar-benar harus dibuktikan secara langsung walaupun bukti tidak langsung itu cukup signifikan dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. 2018. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ali, Mohammad Daud. 2014 *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*. Jakarta: Gramedia
- Bakhri, Syaiful. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: Rajawali Pers
- Di Pradja, Soema, R Achmad. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Efendi, A'an. Dkk. 2017. *Ranuh, Teori Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Kencana.
- Gunadi, Ismu. Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. 2015. *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hiariej, Eddy O.S. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irsan, Koesparmono. Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta.
- Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Kanter, E.Y. & S.R Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kelsen, Hans. 2019. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Kementrian Agama. 2011. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Insan Kamil.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Natsif, Fadli Andi. 2016. *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Natsif, Fadli Andi. 2018. *Ketika Hukum Ber-Bicara*. Jakarta: Prenada.
- Pangaribuan, Aristo M.A & Arsa Mufti & Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sampara, Said & Laode Husen & Fauziah Basyuni & Syamsuddin & Fachri Said. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Sambas, Nandang & Mahmud, Ade. 2019 *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Bandung: Refika.
- Seni, Oemar. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sholihin, Firdaus & Wiwin, Yulianingsih. 2015. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2015. *Hukum Pembuktian*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

- Suteki & Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Syamsudin, M. & Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin, Rahman & Ismail Aris. 2014 *Merajut Hukum Di Indonesia* Jakarta: Mitra Wacana Medis.
- Syamsuddin, Rahman. 2013. *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan*. Makassar: Alauddin University Pres.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syri'ah Komponen MKK*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zulfa, Achjani, Eva. Dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pidana Dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Raja Grafindo.

SKRIPSI/TESIS

- Fransiska Lestari Simanjuntak, *Tesis: Penegakan Hukum Oleh Hakim Agung Republik Indonesia Dalam Menangani Kasasi Perkara Kartel Putusan KPPU Yang Menggunakan Alat Bukti Tidak Lansung (Indirect Evidence)*, (UNHAS: 2018)

JURNAL

- Adam Bastian Mardhatillah, Ahmad Mahyani BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) Jurnal Volume 12 Nomor 1 (Februari 2019 – Juli 2019). (Diakses Senin, 6 Januari 2020).
- Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap”, *Yuridika* , Vol. 32 no. 1 (Januari 2017). (Diakses 1 November 2019).
- Cahya Wulandari, *Legal Analysis Of The Use Of Circumstantial Evidence Theory: Study Of The Supreme Court Decision Number*

777/Pid.B/2016/ Pn Jakarta Pusat, Yustisia Vol. 7 No. 1 (January – April 2018). (Diakses Senin, 6 Januari 2020).

Mahmul Siregar, *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Volume 13 Nomor 2 (Juli-Desember 2018). (Diakses 11 November 2019).

Marwa Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3(Desember 2012). (Diakses 15 November 2019).

Nurlaila Harun, *Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 (Tahun 2017). (Diakses 15 November 2019)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/ Tahun 2010

WEBSITE

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2423>, diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019\

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>, diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019

<https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada hari Jumat, tanggal 25 oktober 2019

<https://bincangsyariah.com/khazanah/tafsir-surah-al-baqarah-ayat-282-283-tentang-prosedur-utang-piutang/>, diakses pada hari Kamis, Tanggal 14 November 2019

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitutum-dan-ius-constituendum/>, diakses pada hari Senin, tanggal 18 November 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dcb3732cca3/arti-itestimonium-de-auditui/> diakses pada hari Senin, 6 Januari 2020

<https://www.dusturuna.com/quran/2282/?hilite=%27al%27%2C%27baqarah%27%2C%27ayat%27%2C%27282%27>, Diakses Pada Hari Selasa, 14 Juli 2020

<http://digilib.uinsby.ac.id/21190/5/Bab%202.pdf> diunduh pada hari Selasa, 14 Juli 2020

<https://www.dusturuna.com/quran/5-8/> diakses pada hari Selasa, 14 Juli 2020

<https://www.rasiyambumen.com/2017/01/asbabun-nuzul-surat-al-maidah-ayat-8.html>, Diakses Pada Tanggal Jumat 17 Juli 2020.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

ALAUDDIN Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 3721 Tahun 2019
T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI TAHUN 2019

- Menimbang :
- Bahwa penulis karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Menunjuk saudara : 1. Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
2. Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Miftahul Chaer Amiruddin
N I M : 10400116135
Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : "Analisis Yuridis Pertimbangan tentang Keyakinan Hakim dalam Memutuskan Perkara dengan Berdasar Circumstantial Evidence atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongsu)".

- Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 22 November 2019
Dekan
Nomor : 3721/SH.01/MP.07.6/11/2019
Tanggal : 25 November 2019

Marilang

Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa; (Sebagai Lampiran)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Miftahul Chaer Amiruddin, lahir di Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 April 1998. Penulis lahir dari pasangan H. Amiruddin B dan Nurhuda Rahman dan merupakan anak keempat dari lima bersaudara.

Pendidikan penulis dimulai pada tahun 2003 di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Kab.Mamuju, kemudian melanjutkan di Pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Karema pada tahun 2004-2010. Pada Tahun 2010-2013 penulis kemudian lanjut pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Mamuju. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Mamuju pada tahun 2013-2016.

Selanjutnya pada tahun 2016, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum melalui Jalur Ujian Masuk Mandiri (UMM) dengan mengambil Konsentrasi Pidana. Penulis menyelesaikan Studi pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan lama studi 4 Tahun 1 Bulan 19 Hari.

Adapun pengalaman organisasi yakni sebagai salah satu kader UKM Olahraga UIN Alauddin Makassar Cabang Basketball, Ketua Angkatan Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2016, Anggota Bidang Seni dan Olahraga Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum Periode 2017/2018 dan 2018/2019, Kader Basic Traianing LK1 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya, Kader Alauddin Law Study Center (ALSC), Anggota Delegasi NMCC MA Purwokerto, Ketua Cabang Basket UKM Olahraga UIN Alauddin Makassar Periode 2018/2019.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa bersyukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar *Circumstantial Evidence* Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)". Semoga dengan penulisan Skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.